

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KULIAH KERJA NYATA
(KKN) BERBASIS POS DAYA
DI KECAMATAN NATAR
DAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2015

Kategori Penelitian : Penelitian Unit

Ketua Peneliti : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Nama : IV b

Golongan Pangkat : 19680530 199403 2 003

NIP : Syari'ah

Jurusan/Program Studi : Jl. Kenanga No 19 Kel.
Mulyojati Metro Barat Metro

Alamat Rumah : 081541511851

Telepon/HP : nurjanahimkan79@yahoo.com

Email : Abdul Mujib, M.Pd.I

Anggota Peneliti 1 : Ahmad Muzakki, M.Pd.I

Anggota Peneliti 2 : Eko Setiawan, M.Kom.I

Anggota Peneliti 3 : Kecamatan Jati Agung dan Natar
Kabupaten Lampung Selatan


Lokasi Penelitian : 6 Bulan

Lama Penelitian : Rp. 26.550.000

Biaya Diperlukan

Metro, 28 Oktober 2015

Ketua Peneliti,


Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya ketua peneliti:

Nama : Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP : 19680530 199403 2 003
Alamat : Jl. Kenanga No.19 Mulyojati Kel. Metro Barat
Kota metro

Menyatakan bahwa penelitian yang dibuat dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) BERBASIS POS DAYA DI KECAMATAN NATAR DAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015"** adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah proposal penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/karya kami sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro, 28 Oktober 2015

Saya yang menyatakan,



Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa halangan yang berarti.

Penghargaan dan terima kasih kami haturkan kepada Ketua STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menetapkan kebijakan adanya program ini. Terima kasih kepada Kepala P3M bapak Drs. Zuhairi, M.Pd, dengan segenap jajarannya yang telah melaksanakan program penelitian. Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada semua pihak.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 28 Oktober 2015

Penulis,



Dra. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
	8
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Implementasi Kebijakan	16
1. Pengertian Implementasi	16
2. Kebijakan Publik	16
B. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya)	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat penelitian	32
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
E. Pendekatan Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran Kecamatan Natar	40
2. Gambaran Kecamatan Jati Agung	40
B. Pembahasan	41
1. Penyusunan Program Kerja Tentatif	41
2. Pelaksanaan Lokakarya Mini	

3. Realisasi Program Kerja	41
4. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat	41
C. Sejarah kecamatan jati agung	41
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	81
B. Saran dan Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kegiatan pemberdayaan keluarga dengan sasaran keluarga miskin pada KKN STAIN Jurai Siwo Metro menekankan pada aspek pemberdayaan keluarga dalam mengentaskan kemiskinan terutama empat bidang garapan, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Dengan wadah Posdaya memungkinkan dilakukan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat khususnya bagi semua segmen usia dalam keluarga dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat secara sistematis. Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? Mengetahui proses formulasi program KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Mengetahui bagaimana model dan bentuk implementasi pelaksanaan program KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah mengintegrasikan semua kegiatan sektoral yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Implementasi kebijakan KKN Posdaya yang dilaksanakan oleh STAIN Jurai Siwo Metro membantu para mahasiswa meningkatkan kemampuan menyatu bersama masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang sudah dipelajari secara langsung dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang diikutinya serta membawa manfaat untuk rakyat. Manfaat KKN Tematik Posdaya Untuk kepentingan keluarga dan masyarakat adalah membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan

keterampilan, KB dan kesehatan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera. KKN Posdaya dapat berjalan lancar dan sambutan warga cukup baik, ramah serta meninggalkan kesan yang mendalam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi sejak akhir tahun 1997 telah menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan pencapaian hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama rezim Orde Baru (1967-1998). Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah kenyataan bahwa meningkatnya angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru tidak benar-benar merefleksikan terjadinya pemerataan kesempatan dan perolehan kesejahteraan secara bermakna. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan hanya melahirkan peningkatan kesejahteraan semu (pada sekelompok kecil orang yang sangat kaya), daripada yang secara riil dirasakan oleh mayoritas penduduk (penduduk miskin).

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan millenium atau MDGs di Indonesia dengan prioritas pengentasan kemiskinan ditargetkan bahwa proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 turun menjadi 8,2% dari jumlah penduduk. Keputusan itu merupakan tekad dan kebijaksanaan pemerintah yang perlu didukung semua instansi dan institusi pembangunan.

Agar upaya itu berhasil dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif. Pembangunan ekonomi yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi perlu melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan yang dilakukan seimbang dan mencapai sasaran. Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan partisipasi sosial. Sosial advokasi juga perlu dilakukan agar komitmen pembangunan lebih kuat.

Mengacu pada kondisi bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pada saat yang lalu kurang dapat menjalankan fungsi sesuai dengan yang diharapkan, maka salah satu potensi dan peluang untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan saat ini adalah melalui model pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Kegiatan pemberdayaan keluarga dengan sasaran keluarga miskin ini menekankan pada aspek pemberdayaan keluarga dalam mengentaskan kemiskinan terutama empat bidang garapan, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Dengan wadah Posdaya memungkinkan dilakukan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat khususnya bagi semua segmen usia dalam keluarga dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat secara sistematis.

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) muncul sebagai respon atas keinginan pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Upaya ini merupakan sumbangan dalam wujud nyata untuk mencapai target pembangunan abad millinium (MDGs) pada tingkat desa dan kelurahan. Pengembangan SDM dan Posdaya yang dilaksanakan tersebut dilakukan melalui kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, mitra kerja lain dan Pemerintah Daerah.

Posdaya sebagai sebuah gagasan pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai kegotongroyongan di masyarakat. Posdaya adalah sebuah gerakan dengan ciri khas "*bottom up programme*", kemandirian, dan pemanfaatan sumberdaya serta potensi lokal sebagai sumber segala solusi.

Posdaya adalah forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga

menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya kesehatan, pendidikan dan wirausaha, agar keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya. Oleh karena itu program advokasi dan pemberdayaan pembangunan yang ditawarkan dalam Posdaya adalah program-program yang mendukung penyegaran fungsi-fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.

Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga yang intinya adalah keikutsertaan dalam KB, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang mapan. Dalam melaksanakan fungsinya, Posdaya merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan anggotanya sehingga pelaksanaan kegiatan itu bisa dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat dan keluarga setempat. Atau dengan pengertian lain, kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar kemampuan dan swadaya masyarakat sebagai upaya memberdayakan keluarga sejahtera dan membangun kesejahteraan rakyat secara luas. Dari pengertian tersebut, beberapa hal perlu diperjelas antara lain :

Posdaya, bukan dimaksudkan untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk mengembangkan forum pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan kepada pimpinan keluarga yang dipadukan satu dengan lainnya. Tujuannya adalah agar pimpinan keluarga mengetahui peran dan fungsinya. Akhirnya

bisa melakukan pemberdayaan untuk anggotanya secara mandiri.

Terpadu berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi melibatkan berbagai petugas atau sukarelawan secara terkoordinir, yaitu petugas pemerintah, organisasi sosial, dan unsur-unsur masyarakat. Penyerasian dinamis disini berarti diperlukan adanya keserasian dalam hal memadukan kepentingan masyarakat dan kemampuan penyediaan bantuan profesional dari pemerintah dan swasta yang disediakan untuk mendukung kegiatan. Posdaya dikembangkan secara bertahap, mulai yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas sampai akhirnya paripurna tergantung dukungan masyarakatnya. Posdaya paripurna merupakan forum pemberdayaan yang bervariasi, dimana sebagian besar pengelolaan dan pembiayaannya dikelola dan berasal dari anggota masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat. Namun demikian, KKN bukan sekedar kegiatan implementasi tetapi juga merupakan bagian dari kurikulum akademik. Sebagai wujud dari pengabdian masyarakat, P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro menyelenggarakan kegiatan berupa kuliah kerja nyata bagi para mahasiswa yang telah menempuh \pm 120 sks. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro melalui Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) sebagai pelaksana kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan berdasarkan persetujuan pimpinan menetapkan bahwa pada tahun 2015 Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan oleh Mahasiswa berbasis Posdaya. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata berbasis Posdaya untuk yang pertama dilakukan pada KKN periode 1 tahun 2015 dimulai dari tanggal 26 Februari 2015 sampai 06 April 2015.

Kuliah Kerja Nyata berbasis Posdaya dilaksanakan selama 40 hari, bertempat di 30 Desa se-Kecamatan Jatiagung dan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kuliah Kerja Nyata berbasis Posdaya yang dilaksanakan mahasiswa disambut baik oleh pemerintah setempat, dalam bentuk kegiatan dan program masyarakat kedepan. Meskipun demikian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mahasiswa tidak luput dari masalah yang dihadapi, masalah-masalah yang ada sebagian besar timbul dari masyarakat itu sendiri. Seperti di desa Rejomulyo Kecamatan Jatiagung, di desa tersebut hampir seluruh warga di siang hari menjadi karyawan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) sehingga aktivitas pelayanan masyarakat pun dilakukan dimalam hari karena menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Akan tetapi meskipun kendala komunikasi dengan warga yang sangat terbatas, Mahasiswa KKN di desa tersebut mampu membentuk Posdaya yang secara resmi di SK kan oleh kepala desa dan melaksanakan program Posdaya di desa tersebut dengan baik sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

KKN Posdaya merupakan KKN yang komprehensif, fasilitator, dan bersifat memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi masyarakat untuk memberdayakan kualitas hidupnya dengan menitikberatkan pada lima pilar yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Pemberdayaan Lingkungan dan Keagamaan. Sasaran dari KKN Posdaya ini adalah tercapainya pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui sinergitas lembaga-lembaga yang telah ada melalui partisipasi aktif dari warga setempat. Penyelenggaraan KKN Posdaya diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, dimana kiprah mahasiswa sebagai *agent of change* dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk membantu masyarakat secara langsung dalam bentuk fasilitasi, asistensi maupun supervisi.

Sedangkan keberadaan KKN Posdaya juga diharapkan dapat membantu tugas pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan KKN Posdaya dimulai dari kegiatan Observasi lapangan yang bertujuan mengumpulkan berbagai data pendukung berupa data keluarga prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2 maupun keluarga sejahtera 3 di lingkungan tempat pelaksanaan KKN. Selain pengumpulan data, kegiatan observasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat untuk selanjutnya ditentukan rencana solusi atas permasalahan tersebut melalui formulasi kegiatan yang tepat.

Dari hasil observasi di lapangan, dapat diketahui beberapa permasalahan diantaranya :

1. Administrasi Posyandu balita masih sederhana dan belum menggunakan form yang baku. Kegiatan yang ada di Posyandu belum dikembangkan secara maksimal
2. Masih sedikitnya tingkat kesadaran orang tua untuk ikut dalam kegiatan Posyandu
3. Banyak balita yang belum mengikuti PAUD atau TK (ada beberapa yang mengikuti PAUD di luar dusun)
4. Posyandu lansia ada tapi kegiatannya belum maksimal
5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok
6. Kesadaran jam belajar kurang sehingga perlu ditingkatkan
7. Kurangnya minat warga untuk berwirausaha
8. Sarana & prasarana untuk pengajian anak kurang memadai
9. Sampah belum dikelola dengan baik

Berangkat dari persoalan tersebut diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa memahami Implementasi Kebijakan KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos

Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sangatlah penting, tentunya untuk menambah Khazanah keilmuan dan mengambil Hikmah dalam melakukan tugas mulia dakwah.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses formulasi program KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengetahui bagaimana model dan bentuk implementasi pelaksanaan program KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
3. Mengetahui siapa saja atau pihak yang terlibat dalam implementasi pelaksanaan KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
4. Mengetahui kekuatan dan hambatan dalam implementasi program KKN Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
5. Untuk Kepentingan Mahasiswa, KKN Tematik Posdaya bertujuan membantu para mahasiswa meningkatkan kemampuan menyatu bersama masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang

sudah dipelajari secara langsung dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang diikutinya serta membawa manfaat untuk rakyat.

6. Untuk kepentingan keluarga dan masyarakat, KKN Tematik Posdaya bertujuan membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan keterampilan, KB dan kesehatan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini akan menambah khasazah kajian keilmuan dalam kebijakan publik, secara khusus dalam kajian implementasi kebijakan.
2. Bagi para stakeholder Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) dilakukan di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam membuat dan menyusun kebijakan.
3. Posdaya mengintegrasikan semua kegiatan sektoral yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan.
4. Posdaya sebagai infrastruktur untuk menangkap dan memanfaatkan peluang pemberdayaan masyarakat dari berbagai pihak (PNPM, KUR, BPR).
5. Posdaya memelihara modal sosial yang ada di masyarakat (gotong royong) dan Kearifan Lokal

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli:

Menurut Nurdin Usman bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Menurut Guntur Setiawan Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.² Menurut Hanifah Harsono implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),h.70 .

² Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.2004), h.39.

Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program".³Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, sebab pada tahap implementasi inilah terdapat implikasi atau dampak-dampak kebijakan tersebut terjadi. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dua hal ini harus didukung oleh hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi dan karakteristik kemampuan agen pelaksana.⁴

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuannya secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya proses implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung pada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup.⁵

³ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002), h.67.

⁴ Sutrisno Iwantono *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan*. (Makalah, Jakarta, 2004).

⁵ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi*, (Bumi Aksara, Cet. Ke-6, Jakarta, 2003). h.125

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut kita dapat menarik benang merah berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Beberapa diantara faktor-faktor tersebut adalah; pertama, isi atau *content* kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.

Kedua, implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketiga, lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi

suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.⁶

Pertama, faktor komunikasi. Dalam hal ini secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi adalah, sebelum pejabat atau penentu kebijakan dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini sering terjadi, tidak terlaksananya program seringkali dimulai dari komunikasi yang tidak baik antar stakeholder kebijakan. Hal ini dapat dijumpai banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

Sedangkan konsistensi adalah jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kejelasan adalah, menurut Edwards yang mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan (ranah hukum).

Kedua, sumber daya. Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni

⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005). h. 90

kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

Ketiga, disposisi (kecenderungan atau tingkah laku), yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sementara itu, menurut Maarse⁷, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian ditentukan pula oleh tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sehingga pelaksana dapat bekerja optimal. Lalu ditentukan juga oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi.

⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan...*, h. 77

Atas dasar hal tersebut, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Pemerintah Daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor. Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya maupun *stakeholders* yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah. Diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah. Diperlukan pula nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan.

Berdasar pada penjelasan diatas, setidaknya berangkat dari konsep Edward II dan Maarse, dapat disimpulkan bahwa, sebagaimana disimpulkan juga oleh Van Meter dan Van Horn⁸ ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Beberapa diantaranya adalah:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur atau tidak jelas, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Penguatan aktivitas dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan

⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan ...*,h.99

instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni:

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan
- 3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁹ Istilah ini dapat

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solihin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang
- h) waktu
- i) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- j) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- k) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan,

standar, proposal dan *grand design*. Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandikebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors indealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara

berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Istilah implementasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Lalu apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.¹⁰

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dapat pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Karena itu ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi mengenai apa itu kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda-beda,

¹⁰ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Ibid.* 1-7

sehingga pengertian-pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang masing-masing penulisnya. Berikut ini beberapa definisi tentang kebijakan public.

Chandler dan Plano menyatakan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.¹¹

Pandangan lainnya dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981). Menurut Dye, kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.¹²

Selain Chandler, Plano dan Dye, sedikit berbeda David Easton (1969) merumuskan kebijakan publik dengan mengartikannya sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam

¹¹Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi*, (Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta, 2003). h 1.

¹²Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep...*, h 3

hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.¹³

Kebijakan sendiri secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:¹⁴

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan administrasi negara. Kebijakan tersebut

¹³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep...*, h 3

¹⁴ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Penerbit Suara Bebas, Yogyakarta, 2006). H 31-33

merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.¹⁵

B. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi di luar kampus. Dalam KKN mahasiswa belajar mengaitkan antara dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-praktis bagi pemecahan permasalahan masyarakat agar masyarakat mampu memberdayakan dirinya untuk menolong diri mereka sendiri (*to help people to help them selves*).

Dinamika kampus dan dinamika masyarakat senantiasa memunculkan tuntutan penyempurnaan penyelenggaraan KKN agar dirasakan efektifitasnya secara terukur. Bagi mahasiswa, merupakan proses, KKN memberikan kesempatan pengalaman hidup di tengah masyarakat untuk memahami dan menghayati kompleksitas permasalahan hidup, belajar merumuskan pilihan pemecahannya dan belajar mendampingi upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat sebagai wilayah dan sasaran pengabdian Perguruan Tinggi, KKN diharapkan memberikan pencerahan dan pemberdayaan agar mereka dapat menolong dirinya sendiri untuk peningkatan kualitas kehidupannya. Penyelenggaraan kegiatan KKN diharapkan dapat menjadi akseleras peningkatan sinergitas dan harmonisasi hubungan institusional antara Pemerintah,

¹⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik,...*, h 21

Perguruan Tinggi dan masyarakat untuk peningkatan performa pembangunan, sedangkan bagi lembaga-lembaga swasta yang terlibat dengan kegiatan KKN, diharapkan menjadi media dan partner perwujudan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Posdaya adalah suatu lembaga masyarakat yang berfungsi atau dapat dimanfaatkan sebagai forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi dan wadah kegiatan penguatan fungsi- fungsi keluarga secara terpadu yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakat.

KKN Posdaya merupakan salah satu jenis Kuliah Kerja Nyata yang bertujuan membentuk, membina, dan mengembangkan Posdaya sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi SDM dan SDA lokal.

Dari sudut masyarakat penerima, KKN Posdaya membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan lembaga Posdaya di desa atau pedukuhan secara sistematis. Posdaya yang dibentuk merupakan wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan, KB, dan kesehatan, dan lingkungan, yang sekaligus merupakan upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan pencapaian tujuan dan sasaran MDGs.

Dari sudut masyarakat penerima, KKN Posdaya membantu membentuk, mengisi dan mengembangkan lembaga Posdaya di desa atau pedukuhan secara sistematis. Posdaya yang dibentuk merupakan wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan, KB, dan kesehatan, dan lingkungan, yang sekaligus merupakan upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau pencapaian tujuan dan sasaran MDGs.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari Kuliah Kerja Nyata Posdaya adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang gerakan Pos Pemberdayaan Keluarga.
- b. Identifikasi potensi lembaga dan tokoh masyarakat yang dapat dijadikan mitra didalam pembentukan Posdaya.
- c. Perorganisasian potensi lembaga dan tokoh masyarakat untuk membentuk Posdaya.
- d. Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat/desa dan kecamatan untuk merintis dan membentuk Posdaya.
- e. Perintisan dan pembentukan Posdaya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
- f. Pembuatan rencana program kegiatan Posdaya.
- g. Membantu merealisasikan program Posdaya, dengan fokus program:
 - 1) PAUD
 - 2) Peningkatan Ekonomi Masyarakat
 - 3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 4) Lingkungan Hidup
 - 5) Peningkatan kehidupan beragama.

Sasaran Kuliah Kerja Nyata Posdaya ini adalah seluruh masyarakat desa di lokasi KKN dengan fokus pada:

- a. Kelompok masyarakat tingkat dusun, RW, dan desa yang belum memiliki Posdaya.
- b. Institusi-institusi sosial ekonomi seperti posyandu, koperasi, PKK, baik yang belum berjalan secara maksimal maupun yang sudah berjalan, tetapi belum terkoordinasi dalam satu wadah.
- c. Tokoh masyarakat seperti: kepala dusun, ketua RT, ketua RW, kepala desa dan aparaturnya.
- d. Keluarga-keluarga muda yang potensial secara social, ekonomi dan keagamaan yang memiliki anak Balita dari kalangan keluarga kurang mampu.

- e. Keluarga-keluarga lansia dari kalangan keluarga miskin.

Target yang ingin dicapai dari KKN Posdaya meliputi:

- a. Terbentuknya minimal di setiap desa dua posdaya yang memiliki:
 - 1) Nama posdaya dengan papan namanya.
 - 2) Pengurus posdaya dengan struktur organisasinya yang disahkan oleh Kepala Desa setempat, dan
 - 3) Rencana program kerja yang tertulis.
- b. Terlaksananya beberapa program posdaya selama waktu KKN.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Karenanya sistem penyelenggaraannya memerlukan landasan ideal yang secara filosofis akan memberikan petunjuk dan mengendalikan pola tindakan dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan berorientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kuliah Kerja Nyata berbasis problem solving untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target tertentu sesuai dengan permasalahannya. Ciri Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan dengan bercirikan :

1. Program kegiatan dirancang, melembaga, berkesinambungan dan berbasis kompetensi.
2. Program kegiatan mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan pemerintah.

3. Dilaksanakan oleh mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan masyarakat.
4. Diselenggarakan dalam waktu terbatas, efisien, efektif dengan mengedepankan kepentingan akademik dan kepentingan masyarakat.

Sifat Kuliah Kerja Nyata adalah melembaga, koordinatif, interdisipliner, berkesinambungan dan berbasis kemasyarakatan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Jurai Siwo Metro Periode I Tahun 2015, didasarkan pada:

1. Landasan Yuridis:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
- d) Keputusan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN;
- e) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 299 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jurai Siwo Metro;
- f) Keputusan Meteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional STAIN Program Sarjana (S1);
- g) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN;
- h) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Jurai Siwo Metro
- i) Kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.
- j) Keputusan Ketua STAIN Jurai Siwo Metro Nomor Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana, Tim Monitoring

dan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Tahun Anggaran 2015.

k) Program Kerja P3M STAIN Jurai Siwo Metro.

2. Landasan Akademik:

- a) Pedoman Pelaksanaan KKN Kemenristek Dikti RI
- b) Pedoman Akademik STAIN Jurai Siwo Metro
- c) Pedoman Kuliah Kerja Nyata Stain Jurai Siwo Metro
- d) Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Perguruan Tinggi di Kota Metro
- e) Panduan Kuliah Kerja Nyata Posdaya

3. Landasan Empirik:

- a) Kesimpulan dan rekomendasi Workshop Penyusunan Rencana Kerja Pengabdian Pada Masyarakat Bagi Dosen STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2014.
- b) Kesimpulan dan rekomendasi Rapat Koordinasi Kuliah Kerja Nyata STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2014
- c) Saran yang berkembang dari pengalaman KKN di lapangan
- d) Saran dan informasi hasil konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan prinsip dan azas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata adalah :

1. Keterpaduan

Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan secara terpadu, mencakup aspek intelektual, sosial-ekonomi, fisik dan manajerial agar mampu meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dari sisi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kuliah Kerja Nyata harus

mampu memadukan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian. Dari unsur program, KKN harus mampu memadukan gagasan bersama antara Perguruan Tinggi, pemerintah, mitra kerja, dengan kebutuhan masyarakat .

2. Kebutuhan

KKN dilaksanakan berdasarkan kebutuhan teras yang dinyatakan oleh perorangan, lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah. Kegiatannya bertumpu pada kepentingan rakyat banyak dan pemerintah yang disusun oleh masyarakat, bersama masyarakat, dalam masyarakat dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

3. Kemampuan sendiri

KKN dilaksanakan dengan mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal serta peningkatan swadaya masyarakat yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri (*self-reliant development*).

4. Interdisipliner

Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, mahasiswa melaksanakan tugasnya atas dasar mekanisme pola pikir dan pola kerja secara interdisipliner.

5. Partisipatif Aktif

Dalam Kuliah Kerja Nyata masyarakat, pemerintah beserta unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan

program ini, didorong berpartisipasi aktif sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.

6. Keberlanjutan

KKN dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Artinya, program kegiatan yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya hingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata adalah untuk :

1. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa sehingga memiliki kepedulian dan kemampuan untuk mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang berbasis kompetensi, profesional, pragmatis dan interdisipliner sebagai upaya untuk lulusan STAIN Jurai Siwo yang cendikiawan dan peduli terhadap masalah lingkungan.
2. Dicapainya akselerasi dan efektivitas program pembangunan yang ditandai oleh semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat dan semakin meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam program pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Terintegrasikan peran Perguruan Tinggi, Pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah untuk :

1. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat serta

- menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai MODIN-AKSI (motivator, dinamisator, akselerator, dan sumber informasi) dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak warga masyarakat dalam memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya serta kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Terbentuknya kader-kader dalam masyarakat khususnya di lokasi KKN sehingga dapat mendorong dinamika kehidupan masyarakat yang positif dalam pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi Kabupaten Lampung Selatan untuk model perencanaan pembangunan ekonomi di seluruh Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Membantu pemerintah daerah Lampung Selatan dalam mempercepat peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*).

Meningkatkan kemampuan dan partisipasi Perguruan Tinggi untuk bekerjasama dengan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya dalam pembangunan masyarakat. Disamping itu juga Kuliah Kerja Nyata dapat memberi masukan bagi pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk meneliti yang menyangkut dengan kelembagaan atau riset kelembagaan dan studi kasus.¹⁶ Penelitian lapangan atau studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁷ Fokus penelitian kasus ini meneliti tentang sejauhmana Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim bahwa penelitian kelembagaan atau studi kasus dapat membantu untuk menjelaskan variabel-variabel penting, proses-proses dan interaksi-interaksi yang memerlukan perhatian yang lebih luas,¹⁸ dalam kehidupan masyarakat di bidang sosial keagamaan. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam¹⁹. Robert Bodgan dan Steven J. Taylor dalam bukunya, "Introduction to Qualitative Research Methods" yang diterjemahkan oleh Arif Furqon: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, baik ucapan

¹⁶ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) h.59.

¹⁷ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian...*,h. 59

¹⁸ Nana sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung : Sinar Baru, 1989) h.195

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 120

maupun tulisan dan perilaku yang akan di ambil dari orang itu sendiri²⁰.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong mendefinisikan bahwa "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya."²¹

Selain definisi dari penelitian kualitatif, dibawah ini juga terdapat definisi dari metode deskriptif, yaitu: secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Metode deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²²

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai objek yang diteliti dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang

²⁰ Robert Bodgan dan Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Terjemahan Arif Furqon, Surabaya: Usaha Nasional, 1992, h. 21-22.

²¹ Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h 3

²² Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghia Indonesia, 2003), h. 53

dihadapi.²³ Sebagaimana telah disinggung pada jenis penelitian, bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dalam bidang pemahaman terhadap Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun sifat penelitian menurut Sayuti Ali bahwa penelitian sosial biasanya menggunakan pendekatan kualitatif, dan oleh karena itu, sifat penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Menurutnya pula, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan angka-angka, artinya penelitian mengasumsikan kenyataan empiris terjadi dalam konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain.²⁴ Lebih lanjut ia mengemukakan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran,²⁵ yang berkaitan dengan kegiatan pengimplementasian Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya). Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis data dengan cara menguraikan data serta menafsirkan secara kualitatif.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumberdata yang berasal dari data penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan

²³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h 5

²⁴ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian...*, h.58

²⁵ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian...*, h. 58

wawancara mendalam yang ditujukan kepada Camat, Kepala Desa, RT dan Ketua Posdaya se-Kecamatan Jatiagung dan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang berasal dari data verbal seperti tulisan opini, data pustaka dan sebagainya. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.²⁶

Sedangkan menurut Suharsini Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data-data diperoleh.²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah darimana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi, yang berupa data-data yang diperlukan.

Menurut Loflanf dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁸

C. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian lapangan ini menggunakan beberapa metode penelitian yang digunakan untuk menghimpun atau mengumpulkan data yang diantaranya yaitu :

1. Metode interview

Metode interview yaitu sebuah metode untuk mendapatkan keterangan atau pendirian lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Metode wawancara (interview) adalah sebuah proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan pengumpulan informasi yang langsung tentang

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 207

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu...*, h. 106

²⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h 112

beberapa jenis data sosial, baik angka terpendam (latent) maupun yang memanifes.²⁹ Interview ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka dibedakan atas :

- a. Interview bebas (inguided interview) dimana pewancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin (guided interview) yaitu interview yang dilakukan oleh pewancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti, yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin³⁰

2. Metode observasi.

Metode observasi yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan memperhatikan suatu kejadian, gerak atau prosa dengan tujuan agar hasil dari sebuah penelitian lebih akurat.³¹ Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³² Metode ini dilakukan dengan jalan terjun langsung kedalam lingkungan dimana penelitian itu dilakukan disertai dengan pencatatan terhadap hal-hal yang muncul terkait dengan informasi data yang dibutuhkan. Metode ini oleh peneliti digunakan untuk memperoleh informasi dari informan, dan untuk mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Posdaya. Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung data yang ada dilapangan, terutama data tentang yang ada di Posdaya se-Kecamatan Jatiagung dan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

²⁹ Lexy. J. Moleong *Metodologi Penelitian...*, h. 192

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia, 1985), h. 129.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), h. 230

³² Sutrisno Hadi, *Method Research II*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1997), h. 136

3. Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi, yaitu sebuah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan lain sebagainya.³³ Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, majalah, agenda dan lain sebagainya.³⁴

D. Teknik Analisis Data.

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode, angket, interview, observasi dan dokumentasi semuanya telah terkumpul dengan lengkap. Setelah data terhimpun, lalu data diolah atau menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya data penelitian dikemukakan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data itu dipisah-pisah menurut kategori, lalu dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan.³⁵ Adapun kesimpulan yang diambil menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara mempelajari sesuatu dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum kemudian diambil suatu kesimpulan.³⁶ Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal kegiatan penelitian hingga akhir dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam proses kualitatif Miles dan Huberman mengatakan: *we define*

³³ Sutrisno Hadi, *Method Research...*, h. 231

³⁴ Sutrisno Hadi, *Method Research...*, h. 236

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research...* h. 117

³⁶ Sutrisno Hadi, *Method Research...*, h. 117

*analysis as consisting of three concurrent flow of activity, data reduction, data display and conclusion drawing/verification.*³⁷

Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono, model *analisis interaktif* dari Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁸ Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan penelitian, baik pada periode pengumpulan data maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Adapun uraian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu guna menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.³⁹
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga

³⁷ Miles, Michael Bray, Huberman, *America, Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publication Ltd., 1995), h 10

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 338

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, h. 338-340.

dapat berbentuk matrik, diagram tabel, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.⁴⁰

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) / verifikasi (*varification*) merupakan bagian akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan. Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan perbandingan kontras, menemukan pola dan tema, pengklasteran (pengelompokkan), dan menghubungkan-hubungkan satu sama lain. Makna yang ditemukan peneliti harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohnya.⁴¹

E. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih atas dasar pertimbangan bahwa apa yang akan diteliti dalam penelitian ini menyangkut pengungkapan fenomena sosial. Dalam kaitan ini, penelitian ini berusaha mengungkap Implementasi Kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) di Kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* ..,h. 341.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*.. h. 345.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 923.002 jiwa (LSDA 2007). Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105⁰ sampai dengan 105⁰45⁰ Bujur Timur dan 5⁰15⁰ sampai dengan 6⁰ Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. Pelabuhan ini sejak tahun 1982 termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Di bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatera terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan Pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 jam. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km² (LSDA 2007), dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa (LSDA 2007), memiliki luas daratan + 2.109,74

km² yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan. Adapun kecamatannya yaitu: 1. Bakauheni 2 Candipuro 3 Jati Agung 4 Kalianda 5 Katibung 6 Ketapang 7 Merbau Mataram 8 Natar 9 Palas 10 Penengahan 11 Rajabasa 12 Sidomulyo 13 Sragi 14 Tanjung Bintang 15 Tanjungsari 16 Way Panji 17 Way Sulan. Dari 21 desa yang diambil untuk kegiatan KKN posdaya sejumlah 14 Desa.

Berdasarkan hasil keputusan lembaga diambil 2 kecamatan Natar dan jati Agung . oleh sebab itu peneliti hanya menguraikan 2 kecamatan tersebut untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata periode I tahun 2015.

B. Sejarah Kecamatan Natar

Berdasarkan keterangan yang didapat dari tokoh masyarakat Serta peninggalan dokumen yang ada, Desa Natar dibuka Tahun 1803 oleh tiga orang barsaudara yaitu:

- 1) Ratu Pengikhan Dulu Kuning
- 2) Lanang Batin
- 3) Tuan Raja Lama

Ketiganya berasal dari Salah satu keturunan Ratu Balau yang sebelumnya semasa Ratu Balau sedang jaya adalah berwilayah di Bukit Singgalang yang sekarang Bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung Panjang. Pada kira-kira tahun 1801 masuklah pemerintah jajahan Belanda ke daerah Lampung, Salah satunya menginginkan menguasai Keratuan Balau, tapi semua keturunan dan ahli warisnya tidak ingin dijajah Belanda semasa itu terpaksa meninggalkan wilayah tersebut karena tidak mungkin mampu mengadakan perlawanan. Maka dari keturunan tersebut di atas sebagian pindah menetap di Desa Kedamaian dan sebagian lagi di Natar. Adapun nama Natar diberi atas persetujuan tiga saudara tersebut di atas, karena semasa akan menetap dicari di sana sini, terdapatlah tanah yang rata antara stasiun PJKA dan Way Rumbai sekarang, maka dalam bahasa daerah disebut Datar atau Natar.

Dalam peresmiannya dilaksanakan kira-kira tahun 1811 yang dihadiri semua penyeimbang penyimbang yang dalam adat Pepadun yaitu Pubian Telu Suku, untuk Penghormatannya. Maka Ratu Pengikhan Dulu Kuning , Lanang Batin, dan Tuan Raja Lama beserta semua ahli warisnya memotong kerbau sebanyak 41 ekor.

Beberapa buay (marga) lain yang berjasa pada pembukaan Desa Natar adalah sebagai berikut:

- 1) Buay Kuning Balau
- 2) Buay Kuning Balau Khulung Gedung
- 3) Buay Gunung Khulung Bujung
- 4) Buay Gunung Khulung Tanoh Bih
- 5) Buay Pemuka Pati

Kelimana menyimpulkan pantun Tiuh Adat yaitu: "Dalom Bangsa Kemala Lain Sai Tali Nanggalai Jemaja Bintang Lima Sepakai Jakni Pesai" Pada 1917 Pemerintah Belanda membuat jalan Kereta Api dalam jalur wilayahnya membelah Desa Natar! maka pada tahun itu pula bergeserlah Desa Natar ke Desa yang sekarang. Pada ketentuan Desa Natar adalah Bandar Natar dan pada kira-kira tahun 1925 berubah menjadi distrik IV Natar. Dan pada tahun 1945 berubah menjadi Asisten Widana Natar. Pada Th. 1960 berubah menjadi Kecamatan Natar. Untuk membangun Kantor Camat di bangun di desa Merak Batin karena ada tanah bekas asing yaitu cina. Kalau dilihat dari data diatas jelas desa natar adalah Desa yang tertua diantara Desa dalam Wilayah Kota Kecamatan Natar.

Menurut sejarah kepamongan Desa Natar telah 18 (delapan belas) kali penggantian Kepala Desa yaitu:

- 1) Tahun 1901 - 1903 dijabat oleh pangeran Dulu Kuning
- 2) Tahun 1903 - 1905 dijabat oleh Dalem Mak Isah
- 3) Tahun 1905 -1910 dijabat oleh Kepala Hukum
- 4) Tahun 1910 - 1915 dijabat oleh Tuan Raja
- 5) Tahun 1915 - 1917 dijabat oleh St. Lanang
- 6) Tahun 1917 - 1926 dijabat oleh Kep. Sangtfn Ratu

- 7) Tahun 1926 - 1928 dijabat oleh Tuan Raja
- 8) Tahun 1928 - 1935 dijabat oleh Kep.Sangon Ratu
- 9) Tahun 1935 - 1944 dijabat oleh Pangeran Bandar
- 10) Tahun 1944 - 1948 dijabat oleh St.Ratu Sc:-bujung
- 11) Tahun 1948 - 1961 dijabat oleh Hyas St.Ratu Hukum
- 12) Tahun 1961-1964 dijabat oleh Wagimun
- 13) Tahun 1964 - 1977 dijabat oleh Sukur St.Ngemum
- 14) Tahun 1977-1979 dijabat oleh A.Razak St.Niti Hukum
- 15) Tahun 1979 - 1984 dijabat oleh Radiman
- 16) Tahun 1984 - 2002 dijabat oleh Hi.Yakub.AD.St. Haji
- 17) Tahun 2002 - 2007 dijabat oleh Suparyono . A.
- 18) Tahun 2007 - sampai sekarang dijabat oleh M.Arif,S.pdi,
St. Perwira⁴²

Batas Wilayah Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Merak Batin
- 2) Sebelah selatan : Desa Pemanggilan
- 3) Sebelah Barat : Desa Negri Sakti - Negara Ratu
- 4) Sebelah Timur : Desa Merak Batin - Sidosari

b. Luas Wilayah Desa Natar

Luas Wilayah Desa Natar adalah sebagai berikut:

- 1) Pemukiman 24,63 ha
- 2) Pertanian Sawah tadah hujan 244,01 ha
- 3) Ladang/tegalan 249 ha
- 4) Sekolah 3.215 ha

Dokumen RPJMDes harus menyesuaikan dengan RPJMDes Kabupaten Lampung Selatan agar pembangunan di Kabupaten bisa berjalan serasi antara desa dan Kabupaten. Sebagai bahan usulan program desa yang akan dijalankan melalui

proses musen bangdes untuk menyusun APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.

⁴²Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.

b. Orbitasi Desa Natar

Orbitasi atau jarak tempuh Desa Natar adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0,5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 0,15 jam
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 90 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 jam⁴³

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013).

c. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 3172 jiwa yang terdiri dari 684 Kepala Keluarga (KK).

1) Mata Pencaharian Penduduk

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015⁴⁴

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1.	Angkatan Belum Bekerja	952
2.	Petani/Penggarap Kebun/Ladang	1322
3.	Pedagang	354
4.	Peternak	279
5.	Wiraswasta	220
6.	PNS/TNI/Polri	45
Jumlah		3172

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Natar bekerja sebagai

⁴³ Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

⁴⁴ Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

Petani/Penggarap Kebun/Ladang dengan jumlah 1322 orang dan mata pencaharian penduduk yang paling sedikit adalah PNS/TNI/Polri 45 orang. Angkatan belum bekerja (usia sekolah dan usia lanjut usia) mencapai 952 orang.

2) Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Latar Belakang pendidikan penduduk penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015.⁴⁵

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Prasekolah	697
2.	Tidak tamat SD	368
3.	SD atau sederajat	498
4.	SLTP atau sederajat	875
5.	SLTA atau sederajat	674
6.	Diploma	38
7.	Sarjana	22
Jumlah		3172

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah tamatan SMP atau sederajat; dengan jumlah 875 orang, sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah Pendidikan Saqana yaitu 22 orang.

⁴⁵ Sumber : Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015

d. Pemerintahan Kecamatan Natar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Natar dapat dirumuskan dari berbagai segi, yaitu:

- a. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundangan yang mengatur mengenai Desa.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Dari segi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of law dan demokrasi.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup;

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintahan Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa didefinisikan, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dan untuk Sekretaris Desa yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa lainnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti dusun atau dengan sebutan lain.

Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat Serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau dari Pemerintah Kabupaten.

1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata Cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang mengxiliki suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kgzpala Desa adalah enam Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun masa jabatan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata Cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok- pokok pertanggungjawabannya.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan kewajiban antara lain:

a. Wewenang Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Kepala Desa

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik

- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lain yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan Unsur Kewilayahan, seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 12 Ayat (2), menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang dimaksud Perangkat Desa lainnya pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, terdiri atas Sekretafis Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa Sekretaris Desa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat (1) diisi

dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- 2) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- 3) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- 4) Mempunyai pengalaman administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- 5) Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- 6) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

b. Perangkat Desa lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat (1), menyebutkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Perangkat Desa lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdiri dari:

- 1) Sekretaris Desa
Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.
- 2) Pelaksana Teknis Lapangan
Pelaksana teknis lapangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) itu seperti kepala urusan.
- 3) Unsur kewilayahannya Unsur wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala dusun atau dengan sebutan lain. Kepala dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa di dalam wilayah

kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dusun mempunyai fungsi:

- a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- b) Pelaksana kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
- c) Pelaksana keputusan desa di wilayah kerjanya
- d) Pelaksana kebijakan Kepala Desa
- e) Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong.
- f) Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintah.
- g) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebutan nama Lembaga Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan ini adalah Wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan Cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan enam Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata Cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut BPD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda Kabupaten masing-masing. Adapun Wewenang BPD dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 adalah sebagai berikut.

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia kemungkinan tidak sama persis. Adapun yang menjadi hak Badan permusyawaratan Desa adalah Meminta keterangan kepada Pemerintah

Desa, dan Menyatakan pendapat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) memiliki hak, diantaranya yaitu:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga nama dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan⁴⁶

Dalam melaksanakan penelitian, sesuai dengan jumlah desa yang ditempati pada peserta KKN adalah desa Tanjung Sari, Negara Ratu, Rulung Helok, Suka Damai, Banjar Negeri, Sidosari, Rulung Sari, Haduyang, Pancasila, Krawang Sari, Kalisari, Purwosari, Bandarejo, Rulung Raya, Rulung Mulya dan Way Sari.

Sementara ada beberapa desa yang tidak ditempati pada peserta KKN. Hal ini dilakukan karena jumlah peserta yang terbatas sehingga tidak bisa terpenuhi hingga keseluruhan desa, dan juga sudah disarkan petunjuk camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan di Natar.

⁴⁶ Sumber: Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015

C. Sejarah Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung terletak paling Utara Kabupaten Lampung Selatan dan terbentuk berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 perihal petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 No. 81 Tahun 1999. Meresmikan/ mendefenitikan Kecamatan Jati Agung dengan Ibu Kota Marga Agung yang meliputi 21 Desa. Batas geografis Kecamatan Jati Agung dengan Wilayah lain adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kotamadya Bandar Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur

a. Jumlah Kepadatan Penduduk Kecamatan Jati Agung

Penduduk Kecamatan Jati Agung tersebar di 21 desa, berikut ini adalah tabel gambaran jumlah penduduk di tiap-tiap desa yang ada di kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan:⁴⁷

Tabel Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Jati Agung menuru Desa, 2015

NO	DESA	LUAS (KM/SEGI)	PENDUD UK	KEPADATAN PENDUDUK
----	------	-------------------	--------------	-----------------------

⁴⁷ Sumber: Jati Agung Dalam Angka 2012

			(JIWA)	(JIWA/KM)
1	Way huwi	1535	11725	763,84
2	jatimulyo	10,53	15.315	1.454,47
3	Banjar agung	5,56	2.110	379,50
4	Gedong harapan	3,65	544	149,01
5	Gedung agung	5,33	1.350	253,28
6	margomulyo	7,01	24,56	350,36
7	Sidodadi asri	12,97	5.276	406,78
8	purwotani	20,02	2.262	112,99
9	Sumberjaya	11,17	3.802	340,38
10	margodadi	6,87	2.942	362,74
11	Margo lestari	10,11	2.584	255,59
12	Marga agung	10,50	3.862	367,81
13	Marga Kaya	5,01	3.004	599,60
14	Sinar rejeki	22,10	6.950	314,48
15	sidoharjo	10,04	2.712	270,12
16	rejomulyo	12,00	5.374	447,83
17	Karang anyar	48,10	15.559	337,51
18	Fajar baru	7,56	5.608	741,80
19	Karang sari	7,25	4.124	568,83
20	Karang rejo	45,45	4.789	105,37
21	Margo rejo	5,00	1.709	341,80

b. Banyaknya penduduk Rumah Tangga

Kecamatan Jati Agung terdiri dari 21 desa yang tiap desa tentunya memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Jumlah rumah tangga dan rata-rata darr tiap-tiap desa di Kecamatan Jati Agung dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel Banyaknya Rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Jati Agung

No	DESA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUD UK	RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA
1	Way huwi	2846	11.725	4,12
2	Jatimulyo	3704	15.315	4,13
3	Banjar agung	648	2.110	3,26
4	Gedong harapan	133	544	4,09
5	Gedong agung	398	1.350	3,39
6	Margo mulyo	718	2.456	3,42
7	Sidodadi asri	1.418	5.276	3,72
8	Purwo tani	573	2.262	3,95
9	Sumberjaya	1.008	3.802	3,77
10	Margo dadi	690	2.492	3,61
11	Margo lestari	692	2.584	3,73
12	Marga agung	1.210	3.862	3,19
13	Marga kaya	832	3.004	3,61
14	Sinar rejeki	1.769	6.950	3,93
15	Sidoarjo	740	2.712	3,66
16	Rejomulyo	1.337	5.374	4,02
17	Karang anyar	3.948	15.559	3,94

18	Fajar baru	1.326	5.608	4,23
19	Karang sari	967	4.124	4,26
20	Karang rejo	1350	4.789	3,55
21	Margorejo	514	1.709	3,32
	JUMLAH	26.821	103.607	3,86
	Jumlah	279.58	103.607	370,56

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jati Agung

Tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

Tugas pokok camat adalah memimpin kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi camat, yaitu:

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan pembimbingan terhadap aparatur kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan kerjasama dan kordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ekonomi dan pembangunan sosial, kesejahteraan masyarakat ketenagakerjaan dan informasi komunikasi, pertahanan dan tata ruang dengan instansi pemerintahan dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di kecamatan.

2. SEKERTARIS KECAMATAN

Tugas pokok sekretaris kecamatan adalah melakukan kordinasi penyusunan program dan rencana kerja kecamatan, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kepegawayan, perlengkapan, pelaksanaan evaluasi dan pelapor kegiatan kantor Serta mengelola administrasi keuangan kantor, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. KASUBAG UMUM

Tugas pokok sub kepala bagian umum adalah melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang surat menyurat kearsipan, perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kecamatan, keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya.

4. KASUBBAG PERENCANAAN

Tugas pokok sub bagian perencanaan adalah: Melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang penyimpanan bahan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kecamatan.

5. KASUBBAG KEUANGAN

Tugas pokok sub bagian keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang penyimpanan bahan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran kecamatan, membukukan dan pertanggung jawaban laporan keuangan.

6. KASI PEMERINTAHAN:

Tugas pokok kepala seksi pemerintahan adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Mempunyai rinci tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh seksi dan sekretariat kecamatan dalam penyusunan program kerja kecamatan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja kecamatan, rencana dan rencana kerja pada seksi

- pemerintahan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi pemerintahan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah.
 - c. Menyiapkan bahan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instgmsi vertikal.
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib adminitrasai pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - f. Memberikan bimbingan, supervasi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
 - g. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan.
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
 - i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa, (BPD) di Wilayah kerjanya.
 - j. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antara desa dan penyelesaian perselisihan desa.
 - k. Melaksanakan kegiatan adminitrasi kependudukan dan pencatataan sipil.

- l. Memimpin, mengerahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.
- m. Membagi habis tugas pemerintahan kepada aparatur non struktural umum, sebagai bawahan agar setiap personil memahami tugas bertanggung jawab masing-masing.
- n. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas terhadap atasan sebagai pertanggung jawaban tugas kerja dan masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut.
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk menyempurnakan hasil kerja lebih lanjut.
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada seksi pemerintahan kepada camat sebagai pertanggung jawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan program dan rencana kerja kecamatan lebih lanjut.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan , sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

7. KASI KETERENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas pokok kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor urusan keterentaman dan ketertiban umum.

8. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Tugas pokok kepala seksi ekonomi dan pembangunan adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor

urusan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

9. KASI SOSIAL ,KESEJAHTRAAN MASYARAKAT ,KETENAGAKERJAAN DAN INF ORMAS KOMUNIKASI

Tugas pokok kepala seksi sosial, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi adalah Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusgn kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan informasi komunikasi.

10. KASI PERTAHANAN DAN TATA RUANG

Tugas pokok kepala seksi pertahanan dan tata ruang adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan dan tata ruang.

d. Struktur Organisasi Kecamatan Jati Agung

Sejak terbentuknya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 1990 telah beberapa kali dijabat oleh Camat , secara berturut turut yaitu:

1. Drs. Ikhsan Rifai	Tahun 1990-1991
2. AkmalHakim,BA	Tahun 1991-1995
3. Sigit,BA	Tahun 1995-1997
4. Toto Sumedi, S.Sos	Tahun 1997-1999
5. Aminudin,BA	Tahun 1999-2003
6. Hasyim,S.S'Os	Tahun 2003-2007
7. Abdullah Sani,S.Sos	Tahun 2007-2010
8. Drs. Sumardi	Tahun 2010
9. Drs. Aswarodi, M.Si	Tahun 2010-2012
10. Drs. Hery Sadli	Tahun 2012 s.d Sekarang

Kemudian untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dibantu oleh satu orang Sekretaris Camat dan 7 orang Kepala Seksi

besebra Staf dan Dinas Instansi Teknis Tingkat Kecamatan. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012-sekarang

1. Camat : Drs. Hery Sadli
2. Sekretaris Camat : Rully Runa Yuda, M.Si
3. Kasubag Umum : Sodri Alfian, S.E
4. Kasubag Keuangan : Jafar Amid, S.E
5. Kasubag Perencanaan : Ika Rahmawati, S.H
6. Kasi Pemerintahan : Minarni, SH
7. Kasi Trantib : Romly
8. Kasi Pertanahan : Sugiono
9. Kasi Ekobang : Yusantina, S.Sos
10. Kasi Kesosnaker & Infokom : Hj. Yusnawati, S.E

Dalam melaksanakan penelitian, sesuai dengan jumlah desa yang ditempati pada peserta KKN adalah desa Jati Mulyo, Way Huwi, Rejo Mulyo, Margo Agung, Margodadi, Gedung Agung, Margo Rejo, Sidodadi Asri, Sinar Rejeki, Sumber Jaya, Margo Mulyo, Purwotani, Sidoharjo dan Karang Rejo.

Sementara ada beberapa desa yang tidak ditempati pada peserta KKN. Hal ini dilakukan karena jumlah peserta yang terbatas sehingga tidak bisa terpenuhi hingga keseluruhan desa, dan juga sudah disarkan petunjuk camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan di Jati Agung.

B. Pembahasan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro sebagai perguruan tinggi Negeri di Metro, yang berkomitmen untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi. Sehingga diharapkan para mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang di dapat selama di perkuliahan serta mampu membaaur dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang heterogen. Selain itu juga diharapkan mampu menyerap aspirasi dan

permasalahan yang berkembang di masyarakat.

KKN yang dilakukan oleh STAIN Jurai Siwo sebagai bagian dari KKN Posdaya Angkatan 1 mengambil lokasi kecamatan Natar dan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Dengan rincian kecamatan Natar diambil 16 desa dan Jati Agung 14 desa, secara keseluruhan berjumlah 30 desa. Pendataan awal dan pemetaan dilakukan di 30 desa 2 kecamatan. Data yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemetaan ini memberi identifikasi jumlah keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, data monografi dan data-data pendukung lain yang diperlukan.

Berdasarkan data, pengamatan dan interview langsung selama periode observasi telah diperoleh beberapa data dan identifikasi permasalahan. Adapun beberapa identifikasi masalah yang ditemukan antara lain :

1. Posyandu

Kegiatan Posyandu dilaksanakan secara rutin setiap bulannya untuk balita. Posyandu Balita dilaksanakan setiap hari Rabu minggu I. Identifikasi masalah yang ada antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat untuk datang ke Posyandu kurang. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang hanya mencapai 50 % dari seluruh balita yang ada.
- b. Minat dan kesadaran ke posyandu perlu ditingkatkan dan perlu adanya program/kegiatan yang mampu menarik minat warga untuk datang ke posyandu dengan mengoptimalkan peran serta kader Posyandu.
- c. Memaksimalkan kegiatan Posyandu lansia disamping cek up rutin untuk mendeteksi penyakit sejak dini juga diperlukan sosialisasi pola hidup sehat dan senam lansia.

2. Kesadaran warga akan bahaya merokok kurang. Hal ini

dibuktikan dengan banyaknya warga yang masih mengkonsumsi rokok. Padahal apabila mereka berhenti merokok, disamping sehat juga dapat menghemat biaya pengeluaran yang sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

3. POS PAUD untuk belum terbentuk, namun demikian bisa dikembangkan dari Kader Posyandu.
4. Jam wajib belajar belum dipatuhi, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu belajar dengan menonton televisi. Kebanyakan dari mereka belajar jika ada PR saja. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan motivasi agar kesadaran akan jam wajib belajar meningkat. Salah satunya dengan pembuatan papan jam wajib belajar agar anak-anak selalu ingat tugas mereka untuk belajar.
5. Minat warga untuk berwirausaha kurang. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ibu rumah tangga yang menganggur di rumah. Alasan utama menurut mereka adalah keterbatasan dana dan kekurang telatenan dalam menjalankan usaha. Padahal apabila UMKM bisa diberdayakan terutama oleh ibu-ibu rumah tangga niscaya dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Maka dari itu diperlukan sosialisasi dan motivasi kepada warga sekitar agar kesadaran untuk ber UMKM meningkat.
6. Sarana dan Prasarana untuk pengajian anak dan umum belum memadai. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana agar anak-anak lebih giat dalam mengikuti pengajian dan menambah wawasan tentang keagamaan.

Dalam kegiatan observasi lapangan, diidentifikasi pula lembaga-lembaga potensial yang dapat mendukung terlaksananya program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam KKN Posdaya, mengingat KKN Posdaya pada tahun ini merupakan kegiatan KKN Tematik yang baru pertama kali

dilakukan di wilayah kecamatan Natar dan Jati Agung. Lembaga yang potensial dapat menjadi motor penggerak utama kegiatan KKN Posdaya yang akan diselenggarakan. Selain itu, lembaga yang potensial ini dapat dijadikan *embrio* bagi terbentuknya lembaga Posdaya seluruh desa tempat KKN.

1. Penyusunan Program Kerja Tentatif

Sebelum peserta KKN Posdaya diterjunkan secara resmi di lokasi pelaksanaan KKN, kepada para mahasiswa peserta KKN diberikan pembekalan-pembekalan oleh berbagai pihak yang kompeten baik dari P3M maupun dari kecamatan maupun Dosen pembimbing lapangan (DPL)terkait. Dengan pembekalan tersebut diharapkan sebelum melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa mempunyai pemahaman yang cukup tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya KKN Tematik Posdaya. Apalagi tema KKN angkatan ke-1 ini relatif masih baru bagi mahasiswa dan juga bagi segenap P3M dan jajarannya.

Pembekalan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu :

1. Tahap I pada tanggal 16 Februari 2015 berupa pemaparan materi Pos pemberdayaan Keluarga utusan dari Yayasan Dana Mandiri (DAMANDIRI) dan panitia KKN Posdaya. Pembekalan ini diikuti segenap dosen DPL P3M, panitia, dan para mahasiswa peserta KKN Posdaya tahun 2015 periode 1 tahun 2015.
2. Tahap II dilaksanakan khusus bagi para mahasiswa peserta KKN Posdaya. Pembekalan tahap II ini dibagi dalam tiga sesi, yaitu : *pretest*, penyajian materi, dan *post test*. Narasumber dari P3M oleh Dra. Siti Nurjanah, M.Ag. dan langsung DPL yang memberikan pemaparan tentang berbagai macam program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Posdaya periode 1 tahun 2015 dan kegiatan yang ada di masyarakat.

Setelah dilakukan pembekalan tahap 1, kegiatan selanjutnya adalah observasi lapangan. Kegiatan observasi

lapangan dilakukan pada tanggal 21-22 Februari 2015, dalam kegiatan ini dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya:

Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data hasil observasi dan telah dikonfirmasi dengan perangkat Dusun serta para kader harus dicari pemecahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, disusun Rancangan Program Kerja Awal. Dengan adanya rancangan program kerja awal ini pelaksanaan KKN Posdaya diharapkan akan lebih fokus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Rancangan program ini masih bersifat *tentatif* atau sementara karena harus disajikan dan dibahas bersama-sama dalam lokakarya mini.

2. Pelaksanaan Lokakarya Mini

Rancangan program awal yang telah disusun sifatnya masih *tentatif* atau sementara. Rancangan program ini harus disajikan dan dibahas lagi untuk dijadikan program yang definitif dan siap dilaksanakan dalam pelaksanaan KKN Posdaya. Untuk itu dilaksanakan lokakarya mini yang bertujuan rancangan program awal yang telah disusun untuk mendapatkan masukan, saran, revisi, dan pemecahan masalah. Lokakarya mini yang dilakukan pada hari Rabu Ahad, tanggal 25 Februari 2015 yang diikuti oleh para pejabat lingkup kecamatan, Dosen pembimbing lapangan perwakilan dari P3M STAIN Jurai Siwo Metro dan juga para mahasiswa peserta KKN.

Dalam penyelenggaraan lokakarya mini dipaparkan mengenai rencana pembentukan posdaya dan berbagai rencana kerja yang akan dilaksanakan yang meliputi lima pilar utama posdaya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi pemberdayaan lingkungan dan keagamaan oleh mahasiswa peserta KKN. Setelah pemaparan selesai dilanjutkan tanggapan oleh para peserta lokakarya mini yang dipandu oleh Dra. Siti Nurjanah, M. Ag. selaku perwakilan P3M STAIN Jurai Siwo Metro. Lokakarya mini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan atas rencana kerja awal yang selanjutnya akan disusun menjadi

rencana kerja *definitif*, selain itu juga dibentuk rancangan formatur kepengurusan posdaya untuk selanjutnya akan dikukuhkan sebagai pengurus posdaya *definitif*.

Program *definitif* sebagai hasil kompromi, diskusi, dan kesepakatan antara warga, pengurus Posdaya, dan mahasiswa peserta KKN Posdaya merupakan revisi dan pengembangan dari program tentatif. Program ini menjadi landasan dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan para mahasiswa peserta KKN Posdaya dan pengurus Posdaya. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dituangkan dalam program definitif dapat dikatakan mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini dikarenakan ditandatangani dan diketahui oleh perwakilan mahasiswa, P3M melalui DPL, ketua Posdaya dan kepala desa.

3. Realisasi Program Kerja

Setelah resmi diterjunkan ke lokasi pada tanggal 26 Februari 2015, maka setiap kami kelompok mengadakan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan KKN Posdaya di setiap desa yang ketempatan KKN posdaya di 2 kecamatan. Selanjutnya dilaksanakan konsolidasi dan koordinasi secara parsial per bidang, artinya tidak melibatkan seluruh komponen dalam kepengurusan Posdaya. Hal ini dilakukan mengingat kesibukan peserta KKN Posdaya dan pengurus Posdaya sendiri serta untuk memudahkan komunikasi dan pendekatan. Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dan ide-ide baru yang belum muncul dalam pelaksanaan lokakarya mini, diantaranya :

- a. Perubahan penetapan jadwal pelaksanaan program kerja Posdaya selama pelaksanaan KKN berlangsung ;
- b. Penetapan Posko KKN Posdaya sebagai tempat koordinasi dan konsolidasi berbagai pelaksanaan program kerja, yaitu di kediaman kepala desa dan posko KKN;

- c. Kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera direalisasikan ;
- d. Tambahan masukan beberapa program kegiatan yang krusial karena perkembangan situasi kondisi di lapangan sehingga ada perubahan beberapa program.

Berdasarkan hasil kesepakatan pada lokakarya mini tanggal 25 Februari 2015 terhadap program kerja sementara akhirnya ditetapkan program kerja Posdaya yang akan dilaksanakan selama berlangsungnya KKN Tematik Posdaya tahun 2015. Secara umum dapat dilaksanakan dengan baik meskipun beberapa program tidak dapat dilaksanakan atau direvisi disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan masukan pengurus pada rapat koordinasi Posdaya.

1). Bidang Pendidikan

1).1.Non Fisik

a. Sosialisasi UU Narkotika dan Bahaya Narkotika.

Sosialisasi UU Narkotika dan Bahaya Narkotika dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015. Media untuk sosialisasi menggunakan prin out tentang materi UU Narkotika dan bahayanya kemudian dibagikan kepada segenap remaja putri. Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon yang sangat positif dari segenap remaja putra dan putri. Sosialisasi program ini mengambil waktu bersamaan dengan mujahadah remaja putri atau pengajian Fattayat. Pelaksanaan sosialisasi Undang Undang tentang Narkotika dan bahayanya yang dipaparkan oleh mahasiswa dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses.

b. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2015. Media untuk sosialisasi menggunakan prin out tentang materi pajak Bumi dan Bangunan kemudian dibagikan kepada segenap warga laki – laki dusun kemas. Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan tanggapan dan

respon yang sangat positif dari masyarakat dusun Kemas dan Bapak Kepala Desa yang juga menghadiri sosialisasi ini, karena berdasarkan informasi dari penilaian Team Kecamatan bahwa hampir setiap desa dalam pembayaran pajak mendapatkan rangking terbawah, Sehingga diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat dusun Kemas sadar akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi program ini berjalan dengan lancar dan sukses.

c. Sosialisasi HIV / AIDS

Sosialisasi HIV/ AIDS dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2015 menggunakan print out materi HIV AIDS serta pemberian stiker Stop HIV AIDS yang dibagikan kepada ibu – ibu warga dusun Kemas. Pelaksanaan sosialisasi yang dipaparkan oleh mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon yang baik dari ibu – ibu dusun Kemas, karena diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat dusun kemas akan lebih hati hati dalam menjaga kesehatan dengan mengetahui dampak dan akibat dari bahaya HIV / AIDS.

d. Merintis Pendirian Paud

Sosialisasi Pospaud dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015. Pelaksanaan sosialisasi Pospaud yang dipaparkan oleh saudari Haryati ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Bahkan mendapat respon positif dari segenap warga dan pengurus Posdaya. Sosialisasi program ini mengambil waktu bersamaan dengan Posyandu rutin. Melalui ibu-ibu kader dan anggota PKK program ini lebih mudah terlaksana.

1).2 Fisik

Pembentukan Pospaud tidak dapat terwujud dikarenakan tidak adanya tempat untuk dijadikan PosPaud, keterbatasan

jumlah kader Posyandu yang akan dikaderisasi menjadi kader Pospaud. Kader Pospaud juga tidak bisa diambilkan dari Ibu-ibu setempat dikarenakan kesibukan masing-masing, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan pelatihan kader Pospaud terhadap para Ibu-ibu yang rencana awalnya akan diadakan setiap hari Minggu. Karena keengganan dari mayoritas warga masyarakat dan berbagai alasan itulah yang menyebabkan Program Pelatihan Kader dan Pembentukan Pospaud tidak dapat terealisasikan.

Selain kegiatan fisik tersebut diatas kami juga memberikan stiker – stiker tentang bahaya merokok dan bahaya narkoba. Pemberian stiker tersebut bersamaan dengan sosialisasi pada Sabtu tanggal 28 februari 2015. Pemberian stiker tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat.

2). Bidang Kesehatan

2).1. Non Fisik

a. Sosialisasi Bahaya Merokok

Peserta KKN Posdaya menjadi fasilitator dan mediator bagi kader dan warga Dusun Kemas. Kegiatan di bidang Kesehatan yang pertama kita selenggarakan adalah Sosialisasi Bahaya Merokok. Sosialisasi bahaya merokok dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015. Media untuk sosialisasi bahaya merokok ini menggunakan print out tentang materi bahaya merokok dan pemberian stiker anti merokok kepada para remaja putra dan karang taruna. Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon yang sangat positif dari segenap remaja putra dan pengurus kader kesehatan posdaya. Sosialisasi program ini mengambil waktu bersamaan dengan muhadadah remaja putra. Pelaksanaan sosialisasi bahaya merokok ini yang dipaparkan oleh Saudara ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga sadar akan bahaya rokok sehingga akan mengurangi konsumsi rokok.

b. Sosialisasi Posyandu Lansia

Sosialisasi Posyandu Lansia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2015. Pelaksanaan sosialisasi posyandu lansia yang di paparkan oleh Dr. Yudiyanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Lapangan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan tanggapan yang baik dari segenap warga kemasannya khususnya para lansia. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar para kader dan lansia agar dapat merintis tentang pelaksanaan program posyandu lansia yang berkelanjutan di dusun Kemasannya.

c. Revitalisasi Posyandu Balita dan Pemberdayaan Kader Posyandu.

Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita dilaksanakan bersamaan dengan Pemberdayaan Kader Posyandu dan dihadiri oleh ibu – ibu Kader Posyandu dan ibu – ibu PKK ataupun ibu – ibu yang mempunyai balita. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Dalam kegiatan ini kami mengisi acara dengan

2).2. Fisik

Kegiatan fisik di bidang kesehatan diantaranya pengadaan stiker bahaya merokok bersamaan dengan sosialisasi bahaya merokok. Sebenarnya pembuatan stiker stop merokok ini hanya langkah awal agar warga terhibau untuk stop merokok. Tetapi mungkin untuk jangka panjang akan lebih bagus jika diadakan penyuluhan rutin dan pembentukan forum stop merokok.

Kegiatan fisik di bidang kesehatan lainnya yaitu berupa pemberian makanan tambahan bagi balita (pemberian roti dan buah pisang), kegiatan ini bekerjasama dengan bidan Desa yang dilaksanakan bersamaan dengan posyandu balita rutin di setiap desa KKN.

Untuk program senam lansia belum dapat terealisasi karena mengingat para lansia yang usianya sudah terlalu lanjut /

tua dan tidak memungkinkan untuk di ajak senam bersama. Sehingga kegiatan fisik lainnya diganti dengan cek up kesehatan bagi lansia, ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja berupa pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pengukuran tekanan darah. Pelaksanaan kegiatan fisik seperti yang telah diuraikan di atas dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

3).Bidang Lingkungan Hidup

3).1. Non Fisik

a. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

Pelaksanaan kegiatan non fisik di bidang lingkungan hidup berupa penyuluhan Pengelolaan sampah organik dan non organik rumah tangga. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses pada hari Kamis 5 Maret 2015. Materi penyuluhan disampaikan oleh Niwang. Kegiatan penyuluhan ini di laksanakan di Masjid Baiuturrahman dusun Kemasam bersamaan dengan Mujahadah Ibu – Ibu. Latar belakang kami memilih program ini dikarenakan masih banyaknya pekarangan warga yang belum dimanfaatkan, serta tersedianya sampah organik dan non organik warga yang belum dimanfaatkan. Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan warga dapat mengelola sampah organik maupun non organik secara mandiri yang dapat dimanfaatkan kembali.

b. Penyuluhan pembibitan sayuran dan tanaman obat keluarga.

Kegiatan non fisik lainnya yaitu kami mengadakan penyuluhan Pembibitan sayuran dan tanaman obat keluarga. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015. Dalam penyuluhan tersebut kami memaparkan cara dan tehnik dalam proses pembibitan sayuran dan tanaman obat keluarga dari tahap penyiapan lahan, proses penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen. Kegiatan

penyuluhan tersebut dipaparkan oleh Saudara Jati dan mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari ibu – ibu Dusun Kemas. Dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat Dusun Kemas dapat memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai jenis sayuran maupun tanaman obat keluarga.

3).2 Fisik

a. Pengadaan tempat sampah Organik dan Non Organik

Pelaksanaan kegiatan fisik di bidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan pengadaan tempat sampah berupa bak sampah dari bahan ban (tempat sampah organik dan non organik) untuk memilah sampah. Diharapkan dengan adanya bak sampah tersebut warga dapat memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya (organik dan anorganik) secara mandiri.

b. Pengadaan Plangisasi dan Papan Informasi.

Pelaksanaan kegiatan fisik lainnya yaitu pengadaan plangisasi penunjuk arah yang di pasang di rumah para pejabat desa dan tempat umum serta pemasangan papan informasi yang di pasang di tempat strategis. Kegiatan plangisasi ini dilaksanakan pada Minggu ke II yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 pukul 13.00 – 15.00 WIB sedangkan pemasangan Papan informasi dilaksanakan pada Minggu ke III yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 pukul 14.00 – 15.00 WIB. Program ini mendapatkan respon yang positif dari warga desa Suka damai, karena selama ini tidak ada penunjuk arah maupun papan informasi, sehingga diharapkan dengan program ini masyarakat dusun Kemas akan lebih mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cepat.

c. Praktek Pemisahan Sampah sesuai dengan jenisnya.

Kegiatan praktek pemisahan sampah sesuai dengan jenisnya kelompok kami melaksanakan dengan cara Kerja Bakti bersama sama dengan warga. Melalui kerja bakti tersebut kami

memberikan contoh cara pemisahan antara sampah organik dan non organik ke tempat sampah yang telah di sediakan sebelumnya. Setelah diberi contoh warga Dusun Kemas kemudian mempraktekannya. Pelaksanaan praktek pemisahan sampah dan kerja bakti massal dilaksanakan pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 di sepanjang Jalan dan Gang desa Pancasila. Kerja bakti ini diikuti oleh seluruh masyarakat Kemas baik dari Bapak – bapak, Ibu – Ibu, Remaja Putra dan putri serta Mahasiswa KKN. Adapun yang dikerjakan dalam kerja bakti tersebut adalah menyapu, mencabuti dan memangkas rumput serta membersihkan parit dan selokan. Kegiatan praktek pemisahan sampah dan kerja bakti tersebut dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 WIB dan mendapat tanggapan yang sangat baik dari masyarakat Dusun Kemas. Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

d. Praktek Pembibitan Sayuran dan Tanaman obat Keluarga.

Kegiatan praktek pembibitan sayuran dan tanaman obat keluarga dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 di tanah pekarangan milik warga. Kegiatan ini di mulai dari pukul 14.00 – 16.00 WIB. Sebelum ibu – ibu melaksanakan praktek pembibitan ini terlebih dahulu diajari tentang tehnik dan tahap tahap dalam pembibitan dari penyiapan lahan sampai dengan proses pemanenan. Adapun jenis sayuran yang dipraktekkan adalah cabe putih, cabe kriting, terong ungu, terong hijau dan tomat. Untuk praktek pembibitan sayuran ini menggunakan media polibek yang sudah diisi dengan tanah hasil campuran dari pupuk kompos. Sedangkan jenis tanaman obat keluarga yang dipraktekkan berupa jahe, kunyit, laos, temulawak, dan kunir. Untuk pembibitan tanaman obat keluarga ini dilaksanakan di tanah pekarangan milik warga.

4).Bidang Ekonomi

4.1. Non Fisik

Untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan warga mengadakan Sosialisasi dan pendampingan UMKM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 di Posko Posdaya. Media sosialisasi UMKM menggunakan print out tentang materi UMKM yang di bagikan kepada ibu- ibu dan bapak-bapak warga. Materi kegiatan yang disampaikan adalah tehnik pemasaran, penjualan dan pemanfaatan limbah rumah tangga khususnya limbah anorganik untuk dijadikan barang kerajinan dan peralatan rumah tangga dengan harapan nantinya dapat dijual sehingga uang hasil penjualan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan keluarga. Pelaksanaan sosialisasi yang di paparkan oleh Fatah Yasin dapat berjalan dengan baik lan lancar. Kegiatan sosialisasi ini mendapat respon yang baik dari warga, karena diharapkan dengan sosialisasi ini dapat menumbuhkembangkan potensi - potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di dusun kemasen sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

4).2. Fisik

a. Praktek Membuat Kue

Pelaksanaan kegiatan fisik di bidang ekonomi yaitu praktek pembuatan Kue Martabak manis. Kegiatan ini mendapat tanggapan dan respon yang baik dari ibu – ibu dan pengurus Posdaya. Karena sebagian besar ibu – ibu belum bisa membuat kue martabak manis. Dalam praktek ini menggunakan 2 (dua) resep yaitu resep martabak rasa Keju dan rasa Coklat. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga Dusun Kemasen.

b. Praktek Membuat Kerajinan.

Kegiatan fisik lainnya yaitu praktek pembuatan kerajinan dari bahan . Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 di Posko Posdaya. Kegiatan ini dibimbing oleh semua Mahasiswa peserta KKN. Adapun jenis kerajinan yang dipraktekkan adalah membuat kerajinan bross, Gantungan kunci, Bando, Jepit rambut, boneka, serta tempat HP.

Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik dari ibu – ibu dan remaja putri. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat akan lebih kreatif dan inovatif dalam membuat kerajinan sehingga mendapatkan nilai jual yang dapat bersaing dengan pasar.

5).Bidang Keagamaan

5).1. Non Fisik

Pelaksanaan kegiatan non fisik di bidang keagamaan meliputi penambahan materi keagamaan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 Ceramah keagamaan dengan Utadzah Ibu Hanim dengan materi tentang pentingnya pendidikan Al. Quran yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman bersamaan dengan kegiatan Mujahadah .

Selain itu kami juga melaksanakan program untuk merintis Taman Pendidikan Al quran. Program tersebut dapat terealisasi dengan memuaskan.

5.2. Fisik

Pelaksanaan kegiatan fisik di bidang Keagamaan meliputi pengadaan sarana dan prasarana keagamaan untuk meningkatkan semangat dan kenyamanan santriwan dan santriwati dalam mengikuti proses pembelajaran di TPA tersebut. Sarana dan prasarana tersebut berupa poster huruf hijaiyah, poster Asmaul Husna, Poster Rukun Islam, Poster Sepuluh Malaikat dan do'a- do'a, kapur, penghapus, Bolpint serta papan nama TPA.

4. Faktor Pendorong Dan Penghambat

Kuliah Kerja Nyata STAIN Jurai Siwo Metro periode 1 tahun 2015 merupakan KKN tematik Posdaya pertama kali dilaksanakan. Segenap jajaran P3M, panitia, para mahasiswa peserta KKN, dan segenap warga berupaya maksimal demi suksesnya pelaksanaan KKN tematik Posdaya. Secara keseluruhan kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar dan

sukses, meskipun di lapangan ditemui beberapa hambatan dan juga faktor pendorong.

Adapun faktor pendorong dan penghambat secara umum dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kegiatan	Pendorong	Penghambat
1.	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Minat warga terhadap pendirian PAUD besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak usia peserta PAUD sangat sedikit - Jumlah kader posyandu yang akan dikaderisasi menjadi kader pospaud terbatas dan disibukkan dengan kegiatan masing-masing
2.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia sudah rutin - Kader Posyandu sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketergantungan pada beberapa kader/pengurus - Keterbatasan alat-alat untuk cek up kesehatan.
3.	Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pekarangan rumah warga masih luas - Tersedianya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada waktu karena kesibukan pekerjaan dan

		bahan untuk pupuk kompos - Antusiasme warga tinggi	proses pembuatan kompos yang dirasa terlalu lama
4.	Bidang Ekonomi	- Antusiasme warga tinggi - Bahan baku mudah didapat tidak perlu keluar biaya untuk mendapatkannya.	- Kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan
5.	Bidang Keagamaan	- Santriwan dan santriwati nya banyak - Tersedianya tempat pembelajaran	- Ustadz dan ustadzah nya terbatas - Sarana dan prasarana kurang memadai

Pada kegiatan KKN Posdaya pada bidang pendidikan Faktor pendukungnya adalah Minat warga terhadap pendirian PAUD besar karena masyarakat membutuhkan pendidikan non formal tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anak usia peserta PAUD sangat sedikit serta jumlah kader posyandu yang akan dikaderisasi menjadi kader pospaud terbatas dan disibukkan dengan kegiatan masing-masing.

Pada bidang kesehatan faktor pendukungnya adalah Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia sudah berjalan dengan rutin, kader Posyandu sudah ada dan terbentuk. Sedangkan

faktor penghambatnya adalah Ketergantungan pada beberapa kader/pengurus serta keterbatasan alat-alat untuk cek up kesehatan.

Pada bidang lingkungan hidup faktor pendukungnya adalah Pekarangan rumah warga masih luas, tersedianya bahan untuk pupuk kompos, antusiasme warga tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Tidak ada waktu karena kesibukan pekerjaan dan proses pembuatan kompos yang dirasa terlalu lama.

Pada bidang ekonomi faktor pendukungnya adalah antusiasme warga tinggi, bahan baku mudah didapat tidak perlu keluar biaya untuk mendapatkannya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

Pada bidang keagamaan faktor pendukungnya Santriwan dan santriwati nya banyak, tersedianya tempat pembelajaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Ustadz dan ustadzah nya terbatas, sarana dan prasarana kurang memadai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata periode 1 tahun 2015 dengan tema Posdaya yang baru pertama kali dilaksanakan oleh STAIN Jurai Siwo Metro, khususnya di 2 kecamatan menjadi 30 kelompok di Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan :

- a. Manfaat KKN Tematik Posdaya Untuk Kepentingan Mahasiswa adalah
 - membantu para mahasiswa meningkatkan kemampuan menyatu bersama masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang sudah dipelajari secara langsung dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang diikutinya serta membawa manfaat untuk rakyat.
 - Manfaat KKN Tematik Posdaya Untuk kepentingan keluarga dan masyarakat adalah membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan keterampilan, KB dan kesehatan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
- b. KKN Posdaya dapat berjalan lancar dan sambutan warga cukup baik, ramah serta meninggalkan kesan yang mendalam.
- c. Perubahan *mind set* atau pola pikir dengan adanya KKN tematik Posdaya perlahan-lahan dapat diterima dan dipahami oleh warga dan mahasiswa peserta KKN Posdaya.
- d. Program kerja yang dapat direalisasikan sekitar 80% - 90% , Program kerja yang belum terealisasikan yaitu pembuatan blangko & form standar Posyandu serta pelatihan dan pembentukan kader PosPaud.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil pelaksanaan kegiatan KKN Posdaya selama penerjunan yang berlangsung dapat disampaikan saran-saran untuk rekomendasi tindak lanjut :

- a. Dukungan dan perhatian dari aparat kelurahan dan SKPD sudah ada namun perlu ditingkatkan.
- b. Kader yang telah ditetapkan dalam SK Posdaya mohon diperhatikan konsekuensi logisnya, demikian juga dengan kader dan pengajar yang ada di PAUD dan TPA.
- c. Beberapa program yang belum dapat dilaksanakan mohon dapat dilaksanakan pada kegiatan KKN periode berikutnya.
- d. Sosialisasi mengenai Posdaya tidak hanya kepada aparat pemerintah namun sebaiknya oleh P3M kepada masyarakat yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa peserta KKN Posdaya dapat dilaksanakan sebelum penerjunan.
- e. Pendampingan dari P3M dan Pemerintah terkait terhadap kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset,2004).
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung:Mutiara Sumber Widya,2002).
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi*, (Yogyakarta:Lukman Offset dan YPAPI, 2003).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1985).
- Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002).
- Miles, Michael Bray, Huberman, *America, Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publication Ltd., 1995).
- Nana sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung : Sinar Baru, 1989).
- Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghia Indonesia, 2003).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002).
- Robert Bodgan dan Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Terjemahan Arif (Surabaya:Furqon, Usaha Nasional, 1992).
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Penerbit Suara Bebas, 2006).

- Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).
- Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003).
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
-, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006).
- Sutrisno Hadi, *Method Research II*, (Yogyakarta:Gajah Mada Press, 1997).
- Sutrisno Iwantono *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan*. (Jakarta:Makalah, 2004).